Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA SEBAGAI TOLOK UKUR GOOD GOVERNMENT

[1]**Clemment Marvello Fedihartono**
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[2]**Tri Andjarwati**
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jalan Semolowaru 45, Surabaya

Korespondensi penulis:
[1]*clemmentmarvellof@gmail.com*
[2]*triandjarwati@untag-sby.ac.id*

Abstract. *Surabaya City is one of the cities with high population growth. This population increase certainly has consequences for the provision of adequate public facilities and employment opportunities that ensure the survival and welfare of the population. One way to assess performance based on the principles of Good Government is through the financial health of the Local Government organization. The purpose of this study based on the formulation of the problems described above is to determine the results of the Financial Ratio Analysis of the Surabaya City Local Government as a Good Government Benchmark. This research uses a quantitative descriptive method, with secondary data coming from the official website of the Information and Data Management Officer. The results of this study indicate that in the 2019-2023 fiscal year the Surabaya City Government in managing its Regional Finances is classified as Inefficient. However, the Surabaya City Government in using resources to obtain PAD is classified as Highly Effective. In terms of regional autonomy, Surabaya City is classified in the Delegative category. However, in terms of allocating resources, the Surabaya City Government still allocates too much to the process of governance compared to the acquisition of long-term assets / fixed assets. In this fiscal year, Surabaya City did not always experience good financial growth, but there were still fiscal years where Surabaya City experienced a decrease in the Realization of Regional Original Revenue and Realization of Regional Expenditure.*

Keywords: *Good Government, Financial ratios, regional original revenue.*

Abstrak. Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

penduduk yang cukup tinggi. Pertambahan penduduk ini tentunya membawa konsekuensi pada penyediaan fasilitas publik yang memadai dan lapangan pekerjaan yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduknya. Salah satu cara untuk menilai kinerja berdasarkan prinsip-prinsip Good Government adalah melalui kesehatan keuangan organisasi Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas adalah untuk mengetahui hasil Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebagai Tolok Ukur Good Government. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan data sekunder yang berasal dari situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2019-2023 Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola Keuangan Daerahnya tergolong Tidak Efisien. Namun, Pemerintah Kota Surabaya dalam menggunakan sumber daya untuk memperoleh PAD tergolong Sangat Efektif. Dalam hal otonomi daerah, Kota Surabaya tergolong dalam kategori Delegatif. Namun dalam hal pengalokasian sumber daya, Pemerintah Kota Surabaya masih terlalu banyak mengalokasikan pada proses penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan perolehan aset jangka panjang/aset tetap. Pada tahun anggaran ini, Kota Surabaya tidak selalu mengalami pertumbuhan keuangan yang baik, namun masih terdapat tahun anggaran dimana Kota Surabaya mengalami penurunan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: 3-5 kata atau frasa yang mencerminkan isi artikel (secara alfabetis).

LATAR BELAKANG

Indonesia pada masa kini telah melewati berbagai macam kendala. Kendala dalam bentuk gejolak politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan yang simpang siur, serta timbulnya ketidakpastian yang bermuara pada keresahan dan letupan-letupan yang justru membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat (Hardjasoemantri, 2003). Gejolak ekonomi dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.

Gejolak ekonomi yang tidak dapat dihindari oleh negara Indonesia sebagai negara berkembang yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi oleh pertumbuhan lapangan pekerjaan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, total penduduk Indonesia hingga semester I-2024 mencapai 282.477.584 jiwa. Jumlah penduduk itu naik sebesar 1.752.156 orang dibandingkan semester II-2023. Secara tahunan (year on year/YoY), jumlah penduduk tersebut naik 1.606.562 jiwa dibandingkan semester I-2023. Pertumbuhan ini tentu saja disumbang oleh berbagai kota-kota besar di Indonesia.

Kota Surabaya menjadi salah satu kota dengan pertambahan jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan buku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proyeksi pada tahun 2023 penduduk Kota Surabaya berjumlah 2.997.547 jiwa, dan tahun 2024 penduduk Kota Surabaya akan meningkat menjadi 3.021.043 jiwa, yang berarti diproyeksikan pertambahan penduduk di Kota Surabaya dari tahun 2023 ke 2024 akan bertambah 23.496 jiwa atau 0,78%. Pertambahan penduduk ini sudah tentu membawa konsekuensi penyediaan fasilitas umum yang memadai dan kesempatan kerja yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk.

Penyediaan fasilitas umum bagi penduduk Kota Surabaya menjadi faktor penting penentu keberhasilan pemerintahan Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dituntut untuk bertanggung jawab dalam setiap pengeluaran yang dilakukan, karena sejatinya penambahan jumlah penduduk akan mengakibatkan penambahan fasilitas umum. Penambahan fasilitas umum akan menyebabkan kenaikan/penurunan pada APBD. Masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah dapat melihat melalui kesehatan keuangan, hal ini dapat dilakukan dengan cara menghitung kesehatan keuangan pemerintah dengan menggunakan alat yaitu rasio keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, antusiasme dan respons positif masyarakat yang besar terhadap sistem pemerintahan yang baik (Good Government) semakin meningkatkan harapan akan terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Good Government

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

menurut (Sadjiarto, 2000) memiliki arti yaitu suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut (Yunus, 2000), empat komponen penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, peningkatan efektivitas di setiap bidang, pemahaman yang lebih jelas tentang siapa yang bertanggung jawab, dan keadilan. Sedangkan menurut (Soelendro, 2000) transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas adalah komponen utama upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Government). Hal ini sebenarnya hasil dari kemajuan profesionalisme dan perkembangan demokratisasi di berbagai bidang. Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran utama dalam pelaksanaannya (Sadjiarto, 2000).

(Wibisono & Prasetyo, 2022) Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Rasio keuangan adalah cara untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Rasio ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan suatu daerah dan kemampuannya untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal (Budiman & Simanjuntak, 2019). Analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kualitas pemerintahan yang baik karena, dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik (Siregar & Kusuma, 2021).

Beberapa faktor menentukan relevansi analisis rasio keuangan sebagai indikator tata kelola yang baik. Pertama, rasio dapat menunjukkan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan. Kedua, hubungan ini menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dalam hal pelayanan dan pembangunan infrastruktur. Ketiga, analisis rasio keuangan dapat membantu menentukan apakah pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab, yang merupakan prinsip dasar dari tata kelola yang baik (Rahman & Putri, 2020).

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Menurut penelitian dari (Susanto, 2019) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram, dengan hasil Rasio Efektivitas yaitu Efektif, Rasio Efisiensi yaitu Kurang Efisien, Rasio Kemandirian yaitu Masih Rendah, Rasio Aktivitas Masih Rendah, Rasio Pertumbuhan yaitu Kurang Baik. Namun penelitian ini belum mengaitkan hasil penelitiannya dengan Good Government. Penelitian ini kurang mendukung dengan fenomena yang terjadi di Kota Surabaya. Maka, peneliti ingin mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hery Susanto pada tahun 2019 dengan menggunakan Rasio Keuangan yang sama pada Kota Surabaya dengan tahun anggaran 2019 – 2023 lalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip Good Government dengan judul Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Sebagai Tolok Ukur Good Government. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Sebagai Tolok Ukur Good Government.

KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori

Teori Tewardship

Teori pengelolaan berasal dari psikologi dan sosiologi. Teori ini dirancang bagi peneliti untuk meneliti situasi di mana eksekutif, sebagai pengelola, termotivasi untuk melakukan apa yang terbaik untuk prinsipal mereka (Donaldson & Davis, 1991). Menurut model manusia dalam teori pengelolaan, seorang pengelola tidak akan menyimpang dari kepentingan organisasinya jika mereka diberi pilihan antara perilaku pro-organisasi dan kolektivistik daripada perilaku individualistik dan mementingkan diri sendiri.

Pada awal masa perkembangan akuntansi sekitar 1957, pendekatan Stewardship telah dipakai sebagai suatu pendekatan untuk menentukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan (Djoko Susanto, 1994). Lebih lanjut

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Djoko Susanto menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang hubungan antara principal dan steward, teori pertanggungjawaban ini sering digunakan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan organisasi non-profit lainnya. Hubungan antara rakyat sebagai pemimpin dan pemerintah sebagai pengelola terbentuk oleh sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, integritas, dan kejujuran satu sama lain. Hal ini didasarkan pada suatu konsep bahwa manajemen dari suatu perusahaan dianggap bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik bertindak sebagai principal dan manajemen (manajer) sebagai steward. Selanjutnya (Dickhaut John W. & MeCabe Kevin A., 1997) memperjelas konsep tersebut dengan mengidentifikasi tiga partisipan, dalam hubungannya dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban finansial) suatu perusahaan, yaitu keberadaan accountant, accountee dan accountor. Ketiga partisipan tersebut saling berinteraksi dalam suatu jaringan akuntabilitas, accountant adalah pihak yang mengukur kinerja ekonomi, accountee (steward) yaitu pihak yang bertanggung -jawab kepada accountor (prinsipal) atas apa yang telah dikerjakan pada organisasi.

Good Government

(Tjokroamidjojo, 2000), dengan teori nya yang masih dipakai oleh peneliti-peneliti hingga kini, menjelaskan definisi pemerintahan yang baik tidak terbatas, tetapi umumnya mengacu pada pemerintahan yang bersih dan terhormat. Secara historis, pemerintahan yang baik berfokus pada pembangunan ekonomi atau pemulihan ekonomi. Namun, saat ini, pemerintah yang baik mencakup warga negara, masyarakat, dan terutama sektor bisnis dan swasta yang terlibat dalam pemerintahan. Dengan demikian, ada pengambil keputusan di pemerintahan, pengambil keputusan di sektor swasta, dan bahkan pengambil keputusan di organisasi masyarakat.

Menurut (Sadjijono, 2007) good government mengandung arti:

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

"Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara". Sedangkan menurut (IAN & BPKP, 2000) yang dimaksud dengan good government adalah: "Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan". Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good government sebagai berikut: "Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivias, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat". Selain itu, (Kharisma, 2014) menyatakan bahwa konsep government dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti perusahaan, internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja keuangan daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk perbaikan government dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

(Rahimallah, 2022) menjelaskan bahwa good government membantu mengintegrasikan antar peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai keharominsan bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja good government, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program yang yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama. Wijayanto (2015) memaparkan salah satu ciri penerapan good government yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik serta mendorong partisipasi masyarakat adalah transparansi pengeluaran pemerintah daerah.

Prinsip *Good Government* adalah sebagai berikut:

a) Participation

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

b) *Rule of Law* (supremasi hukum, kepastian hukum dan independensi peradilan)
c) Transparancy
d) *Responsiveness* (cepat dan tanggap dalam pelayanan publik)
e) *Concensus Orientation* (orientasi pada kepentingan masyarakat luas)
f) *Equity* (kesempatan yang sama bagi masyarakat)
g) *Efficiency* dan *Effectiveness* (pengelolaan sumber daya publik secara berdaya guna dan berhasil guna)
h) *Accountability* (pertanggungjawaban publik)
i) *Strategic Vision* (visi jauh ke depan)

Good Government memiliki asas-asas sebagai berikut :

a) Asas Kepastian Hukum
b) Asas Keseimbangan
c) Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan
d) Asas Bertindak Cermat
e) Asas Motivasi
f) Asas Larangan Mencampuradukkan Wewenang
g) Asas Permintaan yang Layak
h) Asas Keadilan atau Kewajaran
i) Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar
j) Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal
k) Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup
l) Asas Kebijaksanaan
m) Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

APBD

Menurut (Mardiasmo, 2009) mengartikan anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*. Penyusunan anggaran dibuat dengan

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

tujuan untuk membantu manajemen membuat keputusan. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut (Mahsun et al., 2011), dibuat dengan kurun waktu satu tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, dan mencakup semua pendapatan dan pengeluaran oleh pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, adalah rencana keuangan tahunan untuk pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pratiwi, 2019) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya merupakan alat kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berusaha secara nyata dan terorganisir untuk menghasilkan APBD yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing dan memenuhi tuntutan untuk anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, anggaran harus memainkan peran penting dalam menetapkan arah dan kebijakan pemerintah daerah. (Azahra & Lubis, 2021).

APBD dapat bersumber dari beberapa akun, akun-akun tersebut adalah (Yuliyanto et al., 2022):

a. Retribusi.
b. Pendapatan Daerah
c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
d. Pajak Cukai
e. Pajak Penghasilan
f. Dana Bagi Hasil
g. Dana Alokasi Umum

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

h. Dana Alokasi Khusus

i. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah

(Halim & Kusufi, 2012) menyatakan bahwa PAD adalah penerimaan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD bertujuan untuk memberikan kepada Pemerintah Daerah kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi desentralisasi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

a. Pajak Daerah

   Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "yang dimaksud dengan pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah".

b. Retribusi daerah

   Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah "Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan."

c. Perusahaan milik daerah dan Pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

dipisahkan.

Perusahaan milik daerah yang dimaksudkan yaitu BUMD. BUMD menjadi salah satu sumber penerimaan daerah dan membantu masyarakat. Kemudian, jenis pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 adalah (I) bagian laba perusahaan milik daerah, (II) bagian laba lembaga keuangan bank, (III) bagian laba lembaga keuangan non-bank, dan (IV) bagian laba atas pernyataan modal atau investasi.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non-bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2014) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut (Prihadi T., 2019) laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan.

Menurut (Munawir, 2007) Laporan keuangan menurut dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2022 Paragraf 9 memaparkan pengertian laporan keuangan yang berbunyi "laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". PSAK No. 1 mengatur komponen laporan keuangan yang di sajikan oleh perusahaan yaitu berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Rasio Keuangan

(Susanto, 2015) menyatakan bahwa kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan melihat rasio keuangan berdasarkan dari laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara transparan dan akuntabel. Analisis rasio menitikberatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang artinya membandingkan hasil suatu periode. Untuk mengetahui kecenderungannya, periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. (Adhiantoko, 2013), mengungkapkan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan daerah, setiap Pemerintah Daerah menggunakan beberapa rasio yang antara lain, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hery Susanto pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta memastikan ketaatan penyajian serta kesesuaian penyajian laporan menurut kaidah peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yaitu deskriptif, kemudian metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas Kota Mataram tahun anggaran 2013-2015 dikategorikan Efektif, Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013-2015 dikategorikan Kurang Efisien, Rasio Kemandirian

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013-2015 dikategorikan masih Rendah, Rasio Aktivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013-2015 dikategorikan masih Rendah, Rasio Pertumbuhan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013-2015 dapat dikategorikan Kurang Baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sartika, 2019) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun anggaran 2012 hingga 2016. Kinerja ini diukur melalui analisis rasio keuangan, yang mencakup rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio desentralisasi, rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dari penelitian yang dilakukan oleh Novira Sartika, dapat disimpulkan bahwa maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam mengelola keuangannya. Selain itu, Pemerintah Daerah sudah efektif dalam mengelola PAD. Namun, beberapa hal masih menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah, kontribusi PAD dalam penerimaan daerah, dan bagaimana memprioritaskan dana untuk belanja rutin dan pembangunan secara optimal. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan secara langsung pembangunan infrastruktur, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan IPM Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian berikutnya terkait dengan good government dilakukan oleh (Hasanah & Taufik Hidayat, 2023) dengan judul Pengukuran Kinerja Dengan

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Government (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Surabaya Tahun 2017-2021). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya telah efisien, ekonomis, dan efektif. Pengukuran ekonomis didasarkan pada anggaran. Pengukuran efektivitas didasarkan pada rasio jumlah output yang dihasilkan dengan input. Perbandingan antara output yang diharapkan dan yang sebenarnya dapat dilakukan untuk menentukan efektivitas. Menurut penilaian Good Government yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, Dinas Sosial Kota Surabaya telah melakukan kinerja dengan akuntabel. Penilaian akuntabilitas LAKIP dan SAP juga menunjukkan bahwa mereka telah berhasil menerapkan transparansi kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andjarwati et al., 2021) membahas tentang Pendapatan Asli Daerah, judul penelitian tersebut adalah Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan melihat pengaruh secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, yang berarti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan peningkatan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

METODE PENELITIAN

Informasi yang hendak diambil dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan Good Government. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasinya adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya dan sampelnya yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2019 - 2023. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi dokumen. Alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD dari Kantor Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2019 – 2023.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu dengan cara meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis, dengan jenis dokumen yaitu dokumen sekunder. Dokumen berasal dari Web resmi Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kota Surabaya. Dokumen berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2019 – 2023.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis rasio keuangan yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *Good Government* (Transparancy, Accountability, Responsibility, Efficiency, Effectivity, Fairness).

a. Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel.
b. Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio keuangan dari setiap periode.

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

c. Menginterpretasikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan atau dengan melihat grafik dan tabel.

Menurut (Susanto, 2019) dan (Fathah, 2017)umus-rumus penghitungan untuk rasio-rasio keuangan adalah sebagai berikut :

1) Rasio Efisiensi $= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

2) Rasio Efektivitas $= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$

3) Rasio Kemandirian $= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$

4) Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal/Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Modal/Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

5) Rasio Pertumbuhan $= \frac{\text{Total PAD tahun T} - \text{Total PAD tahun (T-1)}}{\text{Total PAD T-1}} \times 100\%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Laporan Realisasi Anggaran

Data yang diperoleh pada Laporan Realisasi Anggaran melalui laman resmi PPID Kota Surabaya yaitu berupa data sebagai berikut :

Realisasi dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi
2019	Rp 5.234.687.226.266,00	Rp 5.381.920.253.809,67
2020	Rp 5.035.094.239.075,00	Rp 4.289.960.292.372,98
2021	Rp 5.322.810.142.550,00	Rp 4.727.280.629.669,69

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

2022	Rp 6.316.345.973.654,00	Rp 5.314.695.257.794,40
2023	Rp 6.592.424.318.658,00	Rp 5.771.818.530.452,64

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi PAD Berdasarkan Tahun Anggaran

Sumber : PPID Kota Surabaya

Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah
2019	Rp 8.765.153.020.782,67	Rp 9.162.655.939.831,57
2020	Rp 7.545.416.994.175,97	Rp 8.032.680.988.065,47
2021	Rp 8.326.878.076.226,29	Rp 7.819.077.321.545,57
2022	Rp 8.791.308.679.482,20	Rp 9.448.236.778.683,50
2023	Rp 9.604.779.764.405,37	Rp 9.543.590.902.934,50

Tabel 5. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Tahun Anggaran

Sumber : PPID Kota Surabaya

Realisasi Bantuan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023

Tahun Anggaran	Bantuan Pemerintah

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

2019	Rp 3.104.324.585.538,00
2020	Rp 2.725.829.859.924,00
2021	Rp 3.218.952.114.659,00
2022	Rp 3.476.613.421.687,80
2023	Rp 3.832.961.233.952,73

Tabel 6. Bantuan Pemerintah Berdasarkan Tahun Anggaran

Sumber : PPID Kota Surabaya

Realisasi Belanja Rutin dan Realisasi Belanja Pembangunan Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023

Tahun Anggaran	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan
2019	Rp 6.404.557.852.973,57	Rp 2.754.304.824.082,00
2020	Rp 6.439.039.886.246,00	Rp 1.583.663.159.605,00
2021	Rp 6.771.433.976.328,20	Rp 1.016.336.503.390,00
2022	Rp 7.679.441.144.733,50	Rp 1.766.030.466.528,00
2023	Rp 7.858.879.310.450,50	Rp 1.671.895.816.185,00

Tabel 7. Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Berdasarkan Tahun Anggaran

Sumber : PPID Kota Surabaya

Pada umumnya, setiap pos akan mengalami kenaikan pada setiap tahun anggaran yang baru. Kenaikan ini dipandang sebagai hal yang baik, karena kenaikan nilai-nilai pada pos sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin lama semakin banyak. Namun, sebagian besar pos mengalami perubahan yang signifikan dan tidak normal pada tahun anggaran 2020. Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan hal tersebut terjadi adalah karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan hampir seluruh kegiatan, terutama kegiatan ekonomi, berhenti.

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Analisis Data

1. Menganalisis Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat Efisiensi Keuangan Daerah digunakan rumus sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Hasil	Keterangan
2019	Rp 8.765.153.020.782,67	Rp 9.162.655.939.831,57	104,54%	TIDAK EFISIEN
2020	Rp 7.545.416.994.175,97	Rp 8.032.680.988.065,47	106,46%	TIDAK EFISIEN
2021	Rp 8.326.878.076.226,29	Rp 7.819.077.321.545,57	93,90%	KURANG EFISIEN
2022	Rp 8.791.308.679.482,20	Rp 9.448.236.778.683,50	107,47%	TIDAK EFISIEN
2023	Rp 9.604.779.764.405,37	Rp 9.543.590.902.934,50	99,36%	KURANG EFISIEN

Tabel 8. Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Daerahh Kota Surabaya

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

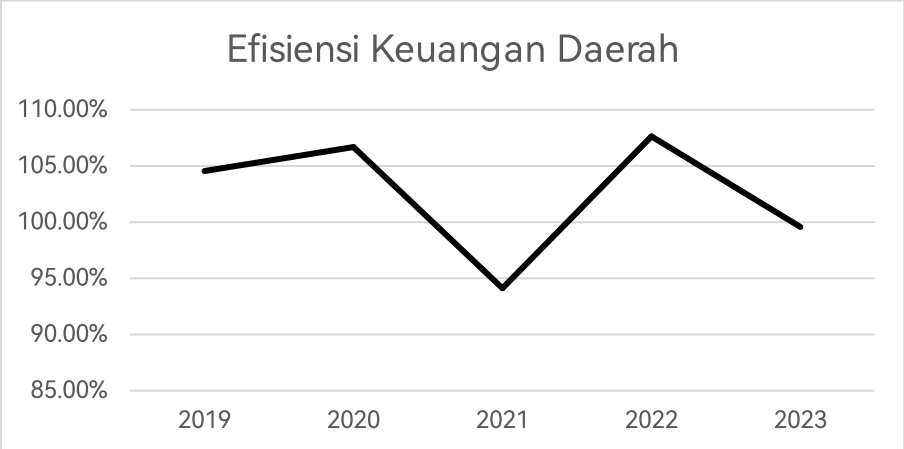

Gambar 5. Grafik Efisiensi Keuangan Daerah Berdasarkan Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil analisis data tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut;

Pada tahun 2019, Kota Surabaya mendapat hasil perhitungan tingkat efisiensi yaitu 104,54%. Hasil ini tergolong dalam kategori tidak efisien, karena angka tersebut berada pada rentang 100% ke atas. Realisasi belanja daerah Kota Surabaya pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar Rp 9.162.655.939.831,57, namun realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya memiliki nilai hanya sebesar Rp 8.765.153.020.782,67. Dapat dikatakan bahwa realisasi belanja daerah terdapat margin sebesar 4,54% lebih banyak dari realisasi pendapatan daerah.

Pada tahun 2020, hasil perhitungan yang diperoleh Kota Surabaya

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

yaitu 106,46%. Hasil perhitungan tingkat efisiensi ini tergolong ke dalam kategori tidak efisien karena rasio efisiensi keuangan daerah Kota Surabaya beraada di atas angka 100%. Realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan drastis hingga berada pada angka Rp 7.545.416.994.175,97, namun realisasi belanja daerah lebih besar 6,46%. Realisasi belanja daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2020 juga menurun hingga berada pada angka Rp 8.032.680.988.065,47.

Pada tahun 2021, Kota Surabaya mendapat hasil perhitungan tingkat efisiensi yaitu 93,90%. Hasil ini tergolong dalam kategori kurang efisien, karena angka tersebut berada pada rentang 90% - 100%. Realisasi belanja daerah Kota Surabaya pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dan memiliki nilai sebesar Rp 7.819.077.321.545,57, sedangkan realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2021 mengalami peningkatan dan memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 8.326.878.076.226,29. Dapat dikatakan bahwa realisasi belanja daerah terdapat margin sebesar 6,10% lebih banyak dari realisasi pendapatan daerah.

Pada tahun 2022, hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah yang diperoleh Kota Surabaya yaitu 107,47%. Hasil perhitungan tingkat efisiensi ini tergolong ke dalam kategori tidak efisien karena rasio efisiensi keuangan daerah Kota Surabaya beraada di atas angka 100%. Realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan hingga berada pada angka Rp 8.791.308.679.482,20, namun realisasi belanja daerah lebih besar 7,47%. Realisasi belanja daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2022 juga meningkat drastis hingga berada pada angka Rp9.448.236.778.683,50.

Pada tahun 2023, Kota Surabaya mendapat hasil perhitungan rasio efisiensi yaitu 99,36%. Hasil ini tergolong dalam kategori kurang efisien, karena angka tersebut berada pada rentang 90% - 100%. Realisasi belanja daerah Kota Surabaya pada tahun 2023 memiliki nilai sebesar Rp

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

9.543.590.902.934,50, sedangkan realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya memiliki nilai sebesar Rp 9.604.779.764.405,37. Dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan daerah terdapat margin sebesar 0,64% lebih banyak dari realisasi belanja daerah.

2. Menganalisis Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah		Hasil	Keterangan
	Target	Realisasi		
2019	Rp 5.234.687.226.266,00	Rp 5.381.920.253.809,67	102,81%	SANGAT EFEKTIF
2020	Rp 5.035.094.239.075,00	Rp 4.289.960.292.372,98	85,20%	CUKUP EFEKTIF
2021	Rp 5.322.810.142.550,00	Rp 4.727.280.629.669,69	88,81%	CUKUP EFEKTIF
2022	Rp 6.316.345.973.654,00	Rp 5.314.695.257.794,40	84,14%	CUKUP EFEKTIF
2023	Rp 6.592.424.318.658,00	Rp 5.771.818.530.452,64	87,55%	CUKUP EFEKTIF

Tabel 9. Analisis Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

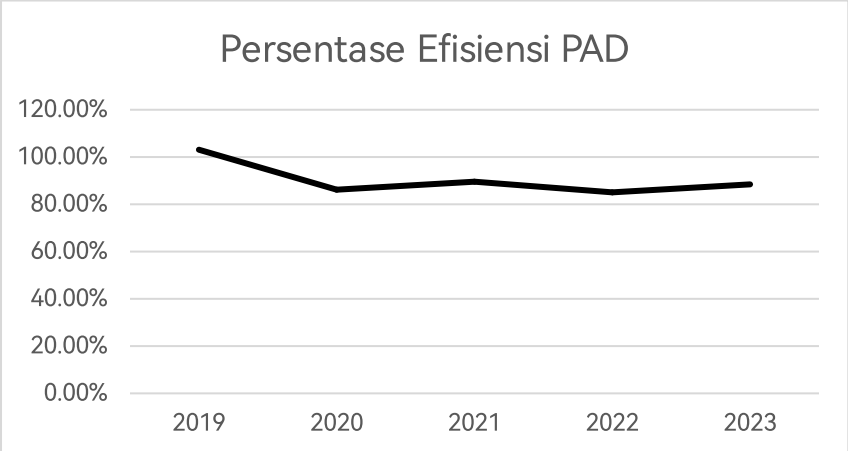

Gambar 6. Grafik Efektivitas PAD Berdasarkan Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil analisis data tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut;

Pada tahun anggaran 2019 penghitungan analisis rasio Efektivitas pada Kota Surabaya mendapatkan hasil yaitu 102,81%. Hasil ini tergolong pada kategori sangat efektif, karena angka tersebut berada pada angka lebih besar dari 100%. Target dari Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2019 Kota Surabaya yaitu di angka Rp 5.234.687.226.266,00. Sedangkan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2019 yaitu di angka Rp 5.381.920.253.809,67. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya dapat dengan sangat baik menggunakan sumber daya dan mewujudkan target Pendapatan Asli Daerah.

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Penghitungan Rasio Efektivitas Kota Surabaya pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun anggaran 2020 Rasio Efektivitas Kota Surabaya berada pada angka 85,20%. Hasil perhitungan ini termasuk pada kategori cukup efektif karena hasil perhitungan tersebut berada di rentang antara 80% - 90%. Pada tahun anggaran ini, target/anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya memiliki nilai yaitu Rp 5. 035.094.239.075,00. Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya memiliki nilai Rp 4.289.960.292.372,98. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah meskipun sudah baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, namun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2020 belum dapat mencapai target/anggaran.

Pada tahun anggaran 2021 penghitungan analisis rasio Efektivitas pada Kota Surabaya mendapatkan hasil yaitu 88,81%. Hasil ini tergolong pada kategori cukup efektif, karena angka tersebut berada pada angka antara 80% - 90%. Target dari Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2021 Kota Surabaya yaitu di angka Rp 5.322.810.142.550,00. Sedangkan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2021 yaitu di angka Rp 4.727.280.629.669,69. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya dapat dengan baik menggunakan sumber daya namun belum dapat mencapai target target Pendapatan Asli Daerah.

Penghitungan Rasio Efektivitas Kota Surabaya pada tahun anggaran 2022 mengalami sedikit penurunan dari tahun anggaran yang sebelumnya. Pada tahun anggaran 2022 Rasio Efektivitas Kota Surabaya berada pada angka 84,14%. Hasil perhitungan ini termasuk pada kategori cukup efektif karena hasil perhitungan tersebut berada di rentang antara 80% - 90%. Pada tahun anggaran ini, target/anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya memiliki nilai yaitu Rp 6.316.345.973.654,00. Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya memiliki nilai Rp

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

5.314.695.257.794,40. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah meskipun sudah baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, namun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2022 belum dapat mencapai target/anggaran.

Penghitungan Rasio Efektivitas Kota Surabaya pada tahun anggaran 2023 mengalami sedikit peningkatan di banding tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 Rasio Efektivitas Kota Surabaya berada pada angka 87,55%. Hasil perhitungan ini termasuk pada kategori cukup efektif karena hasil perhitungan tersebut berada di rentang antara 80% - 90%. Pada tahun anggaran ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya hanya senilai Rp 5.771.818.530.452,64. Namun, target/anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu Rp 6.592.424.318.658,00. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah meskipun sudah baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, namun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2023 belum dapat mencapai target/anggaran.

3. Menganalisis Kemandirian

Untuk mengetahui tingkat Kemandirian Keuangan Daerah digunakan rumus sebagai berikut;

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Tahun Anggaran	PAD	Bantuan Pemerintah	Hasil	Keterangan
2019	Rp 5.381.920.253.809,67	Rp 3.104.324.585.538,00	173,37%	DELEGATIF
2020	Rp 4.289.960.292.372,98	Rp 2.725.829.859.924,00	157,38%	DELEGATIF
2021	Rp 4.727.280.629.669,69	Rp 3.218.952.114.659,00	146,86%	DELEGATIF
2022	Rp 5.314.695.257.794,40	Rp 3.476.613.421.687,80	152,87%	DELEGATIF
2023	Rp 5.771.818.530.452,64	Rp 3.832.961.233.952,73	150,58%	DELEGATIF

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Tabel 10. Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya

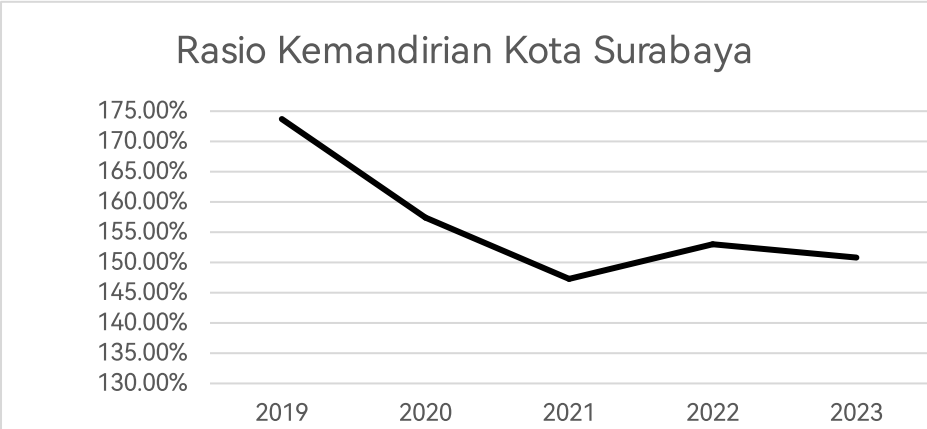

Gambar 7. Grafik Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil analisis data tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut;

Pada tahun 2019, analisis rasio kemandirian Kota Surabaya tergolong pada kategori delegatif. Kategori ini di dapat karena nilai rasio kemandirian Kota Surabaa pada tahun anggaran 2019 berada pada angka 173,37%, atau berada pada angka lebih dari 75%. Angka ini didapatkan berdasarkan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang memiliki nilai Rp 5.381.920.253.809,67, lebih tinggi 73,37% dari Bantuan Pemerintah yang hanya memiliki nilai Rp 3.104.324.585.538,00. Hal ini menunjukkan bahwa Keuangan Kota Surabaya sudhg tidak ada campur tangan pemerintah yang signifikan dalam hal otonomi daerah.

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Pada tahun 2020, penghitungan rasio kemandirian Kota Surabaya memiliki nilai sebesar 157,38%, atau turun 15,99% dari tahun anggaran 2019. Hasil perhitungan rasio kemandirian ini tergolong pada kategori delegatif, memiliki arti bahwa Kota Surabaya sudah dapat berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah atau dalam arti lain Kota Surabaya dapat menjalankan otonomi daerahnya sendiri dengan baik. Pada tahun anggaran 2020 nilai Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yaitu Rp 4.289.960.292.372,98, dan nilai Bantuan Pemerintah untuk Kota Surabaya berada pada angka Rp 2.725.829.859.924,00.

Pada tahun 2021, analisis rasio kemandirian Kota Surabaya tergolong pada kategori delegatif. Kategori ini di dapat karena nilai rasio kemandirian Kota Surabaya pada tahun anggaran 2021 berada pada angka 146,86%, atau berada pada angka lebih dari 75%. Angka ini didapatkan berdasarkan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang memiliki nilai Rp 4.727.280.629.669,69, lebih tinggi 46,86% dari Bantuan Pemerintah yang hanya memiliki nilai Rp 3.218.952.114.659,00. Hal ini menunjukkan bahwa Keuangan Kota Surabaya dalam hal otonomi daerah sudah tidak mengandalkan campur tangan dari pemerintah daerah lain untuk daerahnya.

Pada tahun 2022, penghitungan rasio kemandirian Kota Surabaya memiliki nilai sebesar 152,87%, atau naik 6,01% dari tahun anggaran 2021. Hasil perhitungan rasio kemandirian ini tergolong pada kategori delegatif, memiliki arti bahwa Kota Surabaya sudah dapat berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah atau dalam arti lain Kota Surabaya dapat menjalankan otonomi daerahnya sendiri dengan baik. Pada tahun anggaran 2022 nilai Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yaitu Rp 5.314.695.257.794,40, dan nilai Bantuan Pemerintah untuk Kota Surabaya berada pada angka Rp 3.476.613.421.687,80.

Pada tahun 2023, analisis rasio kemandirian Kota Surabaya mengalami sedikit penurunan. Meskipun begitu, rasio kemandirian Kota Surabaya masih tergolong pada kategori delegatif. Kategori ini di dapat karena nilai rasio

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

kemandirian Kota Surabaya pada tahun anggaran 2023 berada pada angka 150,58%, atau berada pada angka lebih dari 75%. Angka ini didapatkan berdasarkan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang memiliki nilai Rp 5.771.818.530.452,64, lebih tinggi 50,58% dari Bantuan Pemerintah yang hanya memiliki nilai Rp 3.832.961.233.952,73. Hal ini menunjukkan bahwa Keuangan Kota Surabaya dalam hal otonomi daerah sudah tidak mengandalkan campur tangan dari pemerintah daerah lain untuk daerahnya.

4. Menganalisis Aktivitas

Untuk mengetahui tingkat Aktivitas Belanja Daerah digunakan perbandingan dari dua perhitungan dengan rumus sebagai berikut;

a. Belanja Rutin

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

b. Belanja Modal

Rasio Belanja Modal/Pembangunan

$$= \frac{\text{Total Belanja Modal/Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tahun Anggaran	Belanja Rutin	Total Belanja Daerah	Hasil	Persentase
2019	Rp 6.404.557.852.973,57	Rp 9.162.655.939.831,57	0,698984868	69,90%
2020	Rp 6.439.039.886.246,00	Rp 8.032.680.988.065,47	0,801605329	80,16%
2021	Rp 6.771.433.976.328,20	Rp 7.819.077.321.545,57	0,866014454	86,60%
2022	Rp 7.679.441.144.733,50	Rp 9.448.236.778.683,50	0,812790929	81,28%
2023	Rp 7.858.879.310.450,50	Rp 9.543.590.902.934,50	0,823471939	82,35%

Tabel 11. Analisis Belanja Rutin Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran	Belanja Pembangunan	Total Belanja Daerah	Hasil	Persentase
2019	Rp 2.754.304.824.082,00	Rp 9.162.655.939.831,57	0,30060114	30,06%

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

2020	Rp 1.583.663.159.605,00	Rp 8.032.680.988.065,47	0,197152503	19,72%
2021	Rp 1.016.336.503.390,00	Rp 7.819.077.321.545,57	0,129981641	13,00%
2022	Rp 1.766.030.466.528,00	Rp 9.448.236.778.683,50	0,186916407	18,69%
2023	Rp 1.671.895.816.185,00	Rp 9.543.590.902.934,50	0,175185193	17,52%

Tabel 12. Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Surabaya

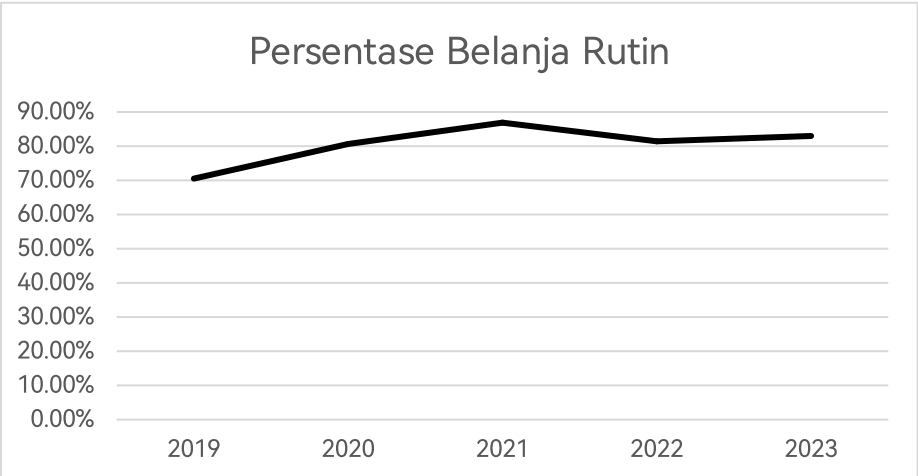

Gambar 8. Grafik Persentase Belanja Rutin Berdasarkan Tahun Anggaran

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

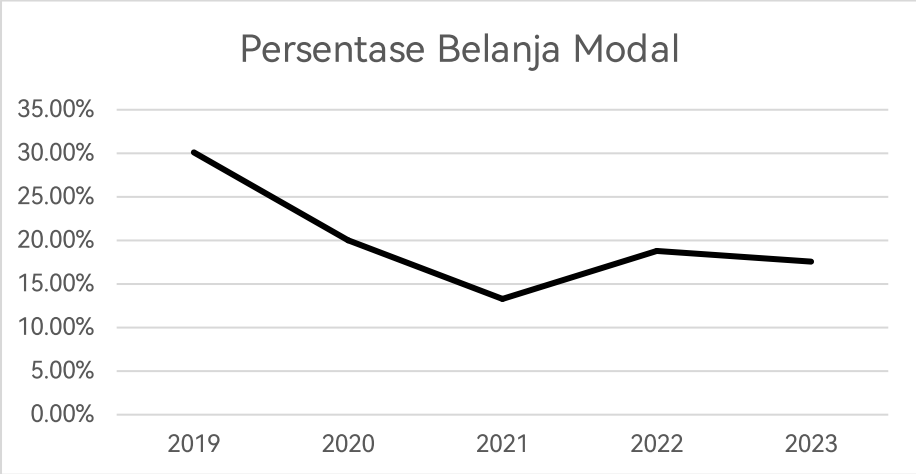

Gambar 9. Grafik Persentase Belanja Modal Berdasarkan Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil analisis data tingkat Aktivitas Keuangan Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut;

Pada tahun anggaran 2019, penghitungan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah di Kota Surabaya memiliki hasilmasing-masing nilai antara belanja rutin dengan belanja modal yaitu 69,90% dan 30,06%. Total belanja daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 9.162.655.939.831,57, dengan nilai belanja rutin yaitu Rp 6.404.557.852.973,57 dan belanja modal sebesar Rp 2.754.304.824.082,00. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengatur sumber daya nya lebih banyak menghabiskan dana pada upaya untuk

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan perolehan aset tetap/aset jangka panjang.

Pada tahun anggaran 2020, total belanja daerah Kota Surabaya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Total belanja daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 8.032.680.988.065,47. Dari nilai tersebut 80,16% merupakan belanja rutin, dan 19,72% merupakan belanja modal. Persentase antara belanja rutin dengan belanja modal yang terpaut sangat jauh menunjukkan bahwa Pemerintah Daerh Kota Surabaya dalam mengalokasikan sumber dayanya lebih condong ke penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan perolehan aset jangka panjang.

Pada tahun anggaran 2021, penghitungan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah di Kota Surabaya memiliki hasil masing-masing nilai antara belanja rutin dengan belanja modal yaitu 86,60% dan 13,00%. Total belanja daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 7.819.077.321.545,57, dengan nilai belanja rutin yaitu Rp 6.771.433.976.328,20 dan belanja modal sebesar Rp 1.016.336.503.390,00. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya nya lebih banyak menghabiskan dana pada upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan perolehan aset tetap/aset jangka panjang.

Pada tahun anggaran 2022, total belanja daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total belanja daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 9.448.236.778.683,50. Dari nilai tersebut 81,28% merupakan belanja rutin, dan 18,69% merupakan belanja modal. Persentase antara belanja rutin dengan belanja modal yang terpaut sangat jauh menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengalokasikan sumber dayanya lebih condong ke penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan perolehan aset jangka panjang.

Pada tahun anggaran 2023, penghitungan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah di Kota Surabaya memiliki hasil masing-masing nilai antara belanja

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

rutin dengan belanja modal yaitu 82,35% dan 17,52%. Total belanja daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 9.543.590.902.934,50, dengan nilai belanja rutin yaitu Rp 7.858.879.310.450,50 dan belanja modal sebesar Rp 1.671.895.816.185,00. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya nya lebih banyak menghabiskan dana pada upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan perolehan aset tetap/aset jangka panjang.

5. Menganalisis Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan Keuangan Daerah digunakan rumus sebagai berikut;

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Total PAD tahun T} - \text{Total PAD tahun (T-1)}}{\text{Total PAD T-1}} \times 100\%$$

Tahun Anggaran	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah
2019	8,22%	12,05%
2020	-20,29%	-12,33%
2021	10,19%	-2,66%
2022	12,43%	20,84%
2023	8,60%	1,01%

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

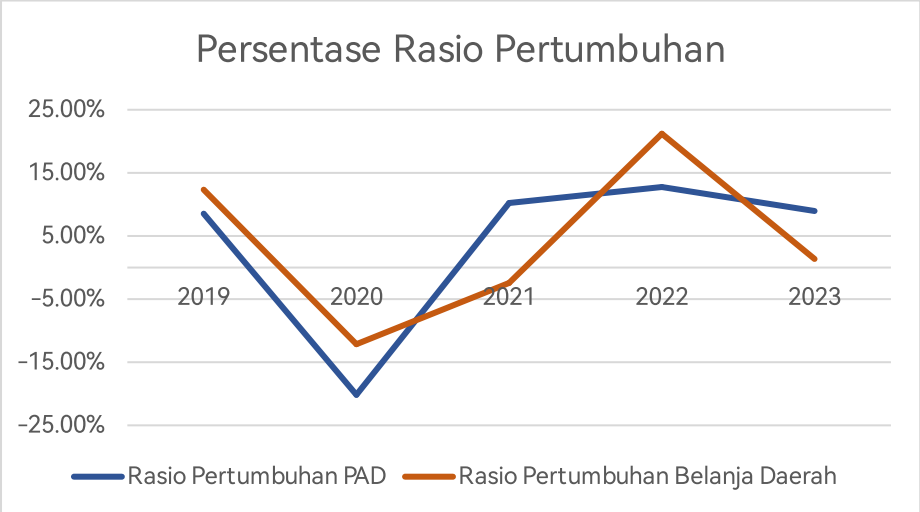

Gambar 10. Grafik Persentase Rasio Pertumbuhan Berdasarkan Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil analisis data Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut;

Rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019 menunjukkan angka persentase yang baik, baik pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah maupun pada rasio pertumbuhan belanja daerah. Pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, tahun anggaran 2019 meningkat 8,22% dari tahun anggaran 2018, atau meningkat Rp 408.889.519.082,57, yang berarti pemerintah sudah baik dalam penyelenggaraan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian pada rasio

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

pertumbuhan belanja daerah, tahun anggaran 2019 meningkat 12,05%, atau meningkat sebesar Rp 985.726.443.532,94, yang sejalan dengan jumlah penduduk Kota Surabaya yang terus meningkat.

Rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2020 menunjukkan angka persentase yang kurang baik, baik pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah maupun pada rasio pertumbuhan belanja daerah. Pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, tahun anggaran 2020 menurun 20,29% dari tahun anggaran 2019, atau menurun Rp Rp 1.091.959.961.436,69, yang berarti pemerintah dalam penyelenggaraan perolehan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal. Kemudian pada rasio pertumbuhan belanja daerah, tahun anggaran 2020 juga menurun sebesar 12,33%, atau menurun sebesar Rp 1.129.974.951.766,10, yang menunjukkan adanya kendala dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki pemerintah Kota Surabaya.

Rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2021 menunjukkan angka persentase yang membaik pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, namun masih belum cukup baik pada rasio pertumbuhan belanja daerah. Pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, tahun anggaran 2021 meningkat 10,19% dari tahun anggaran 2020, atau meningkat Rp 437.320.337.296,71, yang berarti pemerintah sudah baik dalam penyelenggaraan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian pada rasio pertumbuhan belanja daerah, tahun anggaran 2021 menurun sebesar 2,66%, atau menurun sebesar Rp 213.603.666.519,90, yang berarti terdapat kendalam bagi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya nya.

Rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2022 menunjukkan angka persentase yang sangat baik, baik pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah maupun pada rasio pertumbuhan belanja daerah. Pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, tahun anggaran 2022 meningkat sebesar 12,43% dari tahun anggaran 2021, atau meningkat Rp 587.414.628.124,71, yang berarti

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

pemerintah sudah sangat baik dalam penyelenggaraan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian pada rasio pertumbuhan belanja daerah, tahun anggaran 2022 meningkat 20,84%, atau meningkat sebesar Rp1.629.159.457.137,93, yang sejalan dengan jumlah penduduk Kota Surabaya yang terus meningkat serta menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2023 menunjukkan angka persentase yang cukup baik, baik pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah maupun pada rasio pertumbuhan belanja daerah. Pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, tahun anggaran 2023 meningkat sebesar 8,60% dari tahun anggaran 2022, atau meningkat Rp 457.123.272.658,24, yang berarti pemerintah sudah cukup baik dalam penyelenggaraan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian pada rasio pertumbuhan belanja daerah, tahun anggaran 2023 meningkat 1,01%, atau meningkat sebesar Rp95.354.124.251,00, yang sejalan dengan jumlah penduduk Kota Surabaya yang terus meningkat serta menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sudah cukup baik.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penyelenggara pemerintahan, terutama pengelola anggaran, sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan agar segala kebijakan yang diputuskan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini hanya memberikan gambaran umum dari kondisi keuangan dari sebuah organisasi publik dan tidak memberikan faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis Rasio Keuangan yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya, maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan yaitu Hasil analisis Rasio Efisiensi pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat Rasio Efisiensi yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kota

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Surabaya memiliki nilai antara 93,90% hingga 107,47%, dengan rata-rata yaitu 102,35% yang membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengelola Pendapatan dan Belanja Daerah sudah Sangat Efisien. Hasil analisis Rasio Efektivitas pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah. Dengan nilai Rasio Efektivitas antara 84,14% hingga 102,81%, dan nilai rata-rata 89,70% sehingga tergolong pada kategori Cukup Efektif. Hasil analisis Rasio Kemandirian pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya sudah dapat sepenuhnya mengelola sumber daya daerahnya sendiri tanpa mengandalkan campur tangan dari pemerintah lain. Dengan nilai Rasio Kemandirian antara 146,86% hingga 173,37% dan nilai rata-rata 156,21%, sehingga tergolong Delegatif. Hasil analisis Rasio Aktivitas pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengalokasikan sumber dayanya lebih banyak pada proses penyelenggaraan pemerintahan daripada perolehan aset tetap/jangka panjang. Nilai Rasio Belanja Rutin antara 69,90% hingga 86,60%, dan dengan rata-rata 80,06%. Sedangkan Belanja Modal antara 13% hingga 30,06%, dan dengan rata-rata 19,80%. Hasil analisis Rasio Aktivitas pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2019 -2023, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya sudah baik dalam mendorong dan memberi stimulasi agar terjadi pertumbuhan di Kota Surabaya, sehingga sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Nilai Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yaitu antara -20,29% hingga 12,43%, dengan rata-rata 3,83%. Sedangkan Nilai Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah antara -12,33% hingga 20,84%, dan dengan rata-rata 3,78%.

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa dalam menjalankan

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

proses penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah melakukan prinsip-prinsip Good Government. Dalam hal Transperancy, Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah tersedianya informasi publik yang mudah diakses melalui laman resmi. Dalam hal Accountability, Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah memberikan data-data informasi penyelenggaraan pemerintahan yang tepat, akurat, dan terpercaya. Dalam hal Responsibility, Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Effectivity, Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara cukup efektif. Dalam hal Efficiency, Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Kemudian dalam hal Fairness, Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah memberikan data-data informasi penyelenggaraan pemerintahan serta laanan publik yang dapat diakses oleh siapa saja.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa saran yaitu Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebaiknya lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk perolehan aset tetap/aset janga panjang, terutama yang berkaitan dengan teknologi terbaru untuk pelayanan publik. Untuk Penelitian selanjutnya, dalam melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Good Government, sebaiknya metode perolehan data menggunakan kuesioner, sehingga dapat mengukur Good Government tidak hanya melalui kondisi keuangannya saja.

DAFTAR REFERENSI

Adhiantoko, H. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021*). Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of*

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Districts And Cities In The Region Of East Java Province. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, *13*(1), 235–250. Https://Doi.Org/10.34109/Ijefs.202112233

Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran Dprd Dalam Pengawasan Dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *05*(03).

Budiman, M. A., & Simanjuntak, T. M. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Bekasi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*. *08*(02).

Dickhaut John W., & Mecabe Kevin A. (1997). The Behavioral Foundation Of Stewardship Ar- Counting And A Proposed Program Of Rossach: What Is Accountability? *Behavioral Research In Accounting*, *09*, 62–87.

Djoko Susanto. (1994). Kerangka Konseptual Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Manajemen*.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, *16*, 49–64.

Fathah, R. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank*, *8*(1), 33–48.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Public Sector Accounting: Regional Financial Accounting. *Jakarta: Salemba Empat*.

Hardjasoemantri, K. (2003). *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional Ke Viii Di Bali*.

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Hasanah, I., & Taufik Hidayat, M. (2023). Performance Measurement With The Value For Money Approach As An Embodiment Of Good Governance (Case Study At The Surabaya Social Service For 2017-2021). *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, *4*(3), 2675–2693. Http://Journal.Yrpipku.Com/Index.Php/Msej

Ian, & Bpkp. (2000). *Pelayanan Publik. Malang: Cv Citra Malang*.

Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Ketiga Belas, Liberty, Yogyakarta*.

Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, *19*(01).

Mahsun, Moh., Firma, S., & Heribertus, A. P. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.

Munawir. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Ketiga Belas, Liberty, Yogyakarta*.

Pratiwi, I. (2019). *Fungsi Dan Peranan Dprd Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Medan Area.

Rahimallah, M. T. A. (2022). *Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik Dan Normatif)*.

Rahman, A. H., & Putri, S. P. (2020). Evaluasi Good Government Berdasarkan Rasio Keuangan: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *07*(01).

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah (Arja Sadjiarto). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, *02*(02). Http://Puslit.Petra.Ac.Id/Journals/Accounting/

Edit dengan WPS Office

Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 4 No. 1 Agustus 2024
E-ISSN : 2807-6648, Hal 00-00
DOI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI

Sadjijono. (2007). Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance. *Laksbang*.

Sartika, N. (2019). Inovbiz Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. In *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* (Vol. 7). Www.Ejournal.Polbeng.Ac.Id/Index.Php/Ibp

Siregar, E. R., & Kusuma, R. A. (2021). *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 145-158*. *12*(03).

Soelendro, A. (2000). *Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, *7*(1).

Tjokroamidjojo, B. (2000). Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. *Jakarta: Ui Press*.

Wibisono, A., & Prasetyo, E. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Implementasi Good Government Di Kota Besar Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Daerah Dan Otonomi*, *11*(04), 210–226.

Yuliyanto, W., Uswatun Khasanah, & Riza Umami. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Apbd Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, *6*(2), 456–468. Https://Doi.Org/10.37339/E-Bis.V6i2.989

Yunus, H. (2000). *Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik*.

Edit dengan WPS Office